

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Tipe Penelitian	13
1.5.2 Pendekatan Penelitian	13

1.5.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	18
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematis	18
 BAB II URGENSI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM BADAN PERWAKILAN DI DESA	
2.1 Konsep Representasi Dan Keterwakilan Perempuan	20
2.2 Peran Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa	31
 BAB III PENGATURAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENCALONAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
3.1 BPD Dalam UU Desa	42
3.2 Peran BPD Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	50
3.3 Mekanisme Pencalonan Dan Pemilihan Anggota BPD	54
 BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	60
Saran	61
DAFTAR BACAAN	62

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1958);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2779);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5497);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 226);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Ketua/Anggota Badan Permusyawaratan Desa	31
Tabel 2. Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	33
Tabel 3. Peranan Unsur Masyarakat Desa	38

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

BMD (Badan Musyawarah Desapraja)

BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPS (Badan Pusat Statistik)

CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*)

DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

HAM (Hak Asasi Manusia)

KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

KPU (Komisi Pemilihan Umum)

LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa)

LMD (Lembaga Musyawarah Desa)

PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)

SDGs (*Sustainable Development Goals*)